

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada tanggal 31 Maret 2015. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini telah berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 April 2015. Dengan demikian, sektor industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus mengimplementasikan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) perlu menyesuaikan struktur organisasinya dan menyiapkan perangkat-perangkatnya, agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola nya setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penerapan tata kelola yang baik pada sektor perbankan, khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) semakin dibutuhkan seiring dengan semakin meningkatnya volume usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hal ini diperlukan agar Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat mengatasi resiko yang akan terjadi akibat peningkatan volume usaha. Penerapan tata kelola ini diterapkan dengan maksud agar

dapat melindungi pemangku kepentingan (*stake holders*), meningkatkan kinerja bank, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan tata kelola diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) karena pada penerapan tata kelola ini mencakup nilai-nilai etika yang harus diterapkan oleh industri perbankan. Penerapan tata kelola yang baik, mampu memperkuat posisi daya saing industri perbankan secara berkesinambungan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan corporate value dan kepercayaan investor.

Dengan demikian, industri perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus mampu menerapkan atau mengimplementasikan peraturan ini agar dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pada Sumatera Barat terdapat 81 (delapan puluh satu) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan 10 (sepuluh) Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang terdaftar pada kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, penulis tertarik untuk menulis mengenai penerapan tata kelola pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan judul **“Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengawal Penerapan POJK Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)”**.

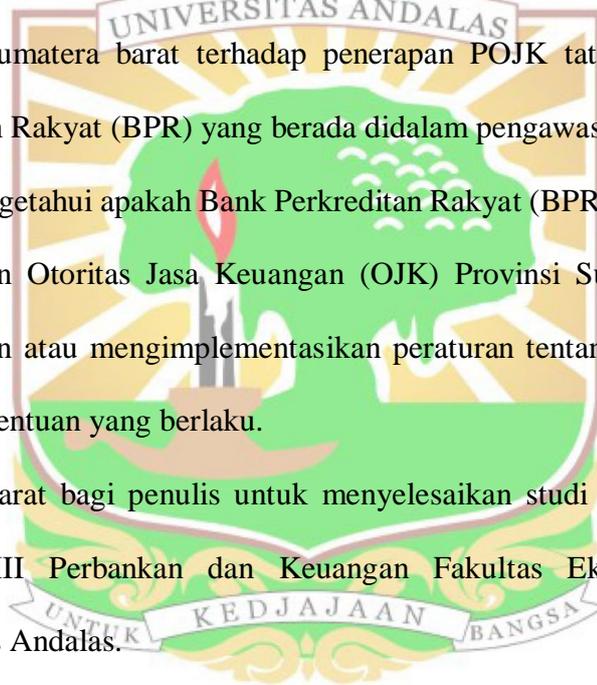
1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat dalam mengawal penerapan pelaksanaan POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dari kegiatan magang yang dilaksanakan adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera barat terhadap penerapan POJK tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berada didalam pengawasannya.
2. Untuk mengetahui apakah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan atau mengimplementasikan peraturan tentang tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi pada program studi Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.



1.4 Manfaat Penulisan

Dalam penulisan laporan tugas akhir pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat, diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Bagi penulis
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai pengembangan ilmu penulis mengenai Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengawal Penerapan POJK Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

- b. Sebagai masukan dan langkah awal untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja dan memberikan pengalaman untuk menerapkan teori yang diberikan selama perkuliahan serta berkontribusi dalam kegiatan operasional perusahaan.
 - c. Sebagai sarana latihan dan aplikasi teori-teori, sehingga bisa mengimplementasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan kedalam praktek kerja yang sesungguhnya.
 - d. Mendapatkan pengalaman yang nyata untuk menghadapi dunia kerja dimasa yang akan datang.
 - e. Salah satu syarat guna menyelesaikan studi program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.
2. Bagi pembaca
- a. Sebagai bahan referensi dan menambah pengetahuan, serta mengkaji masalah-masalah yang terkait dengan Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengawal Penerapan POJK Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan rakyat (BPR).
 - b. Sebagai sarana untuk mengetahui kualitas serta kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya dan menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku dikampus.
3. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat

- a. Membina kerjasama antar lembaga pendidikan dengan instansi pemerintah.
 - b. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat dimana tempat penulis melakukan kegiatan magang.
4. Bagi Universitas Andalas
- a. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara lembaga pendidikan dengan instansi pemerintah, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Universitas dapat melahirkan lulusan yang memiliki pengalaman kerja untuk dapat bersaing dalam dunia kerja dimasa yang akan datang.
 - c. Mendorong kemajuan alumni Universitas Andalas dimasa yang akan datang.

1.5 Metode Penelitian/Observasi/Pengamatan

Dalam menyusun tugas akhir ini penulis menggunakan beberapa metode yang dapat penulis jadikan sarana untuk mencari informasi yang berkaitan dengan judul pokok bahasan yang penulis jelaskan diatas, adapun metode yang akan penulis gunakan yaitu :

1. Studi keperustakaan

Studi keperustakaan yang penulis lakukan adalah dengan membaca, mencari, dan mengumpulkan bahan dari buku yang berhubungan dengan topik/judul yang akan penulis bahas, yaitu tentang penerapan POJK tentang tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

2. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan secara langsung oleh penulis pada perusahaan yang menjadi objek studi yaitu kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga dapat diperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan, serta mempelajari data yang berkaitan dengan pelaksanaan magang di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat.

3. Metode analisis

Studi ini untuk menganalisis teori yang telah diterima dari perkuliahan dengan kenyataan di lapangan untuk mencari letak perbedaannya sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan dan saran.

4. Pencarian data melalui internet

Pencarian data melalui internet dilakukan dengan mencari referensi, dan bahan-bahan pendukung lainnya melalui situs-situs dan web terkait.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari masa kerja yang dimulai pada 04 Januari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023.

Kegiatan magang dilaksanakan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman No. 68, Ulak Karang Sel, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25137.



Gambar 1.1 Kantor Otoritas jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab yang mana disetiap bab terdiri dari sub-sub bab yang menjadi satu kesatuan kerangka pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan tentang : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Penelitian/ Observasi/ Pengamatan, Tempat Dan Waktu Magang, Serta Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori ini menggambarkan tentang tinjauan pustaka, yang membahas tentang Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengawal Penerapan POJK Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

BAB III GAMBARAN UMUM

Pada bab ini berisikan tentang profil Otoritas Jasa Keuangan (OJK), visi dan misi, fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai-nilai dan asas, sejarah singkat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan struktur organisasi.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis membahas tentang Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengawal Penerapan POJK Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang dibahas oleh penulis, yang diharapkan dapat bermanfaat serta saran yang sesuai dengan hasil yang telah dibahas oleh penulis.

